

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai peran Dewan Arktik (*Arctic Council*) dalam menangani konflik lingkungan dan sumber daya alam di kawasan Arktik, penelitian ini merumuskan beberapa kesimpulan utama. Pertama, Dewan Arktik telah terbukti berhasil menavigasi kelemahan strukturalnya sebagai institusi tata kelola lingkungan regional yang bersifat non-mengikat melalui mobilisasi Komunitas Epistemik. Melalui berbagai Kelompok Kerjanya, seperti AMAP dan PAME, dewan ini mampu beroperasi secara efektif dalam menghasilkan pengetahuan konsensual yang diakui validitas serta kredibilitasnya, sehingga sukses membingkai isu lingkungan non-tradisional menjadi agenda kebijakan yang mendesak. Keberhasilan ini tidak terbatas pada produksi *soft law* semata, melainkan juga memfasilitasi terjadinya *institutional spillover*. Data dan rekomendasi ilmiah yang dihasilkan oleh Dewan Arktik telah menjadi landasan utama bagi pembentukan berbagai rezim *hard law* di tingkat global dan regional, di antaranya adalah Konvensi Stockholm tentang POPs, Konvensi Minamata tentang Merkuri, dan *Polar Code* oleh IMO.

Lebih lanjut, Dewan Arktik juga mencatat pencapaian signifikan sebagai organisasi batas (*boundary organization*) yang inklusif dengan menyeimbangkan kredibilitas ilmiah dan legitimasi politik. Salah satu tonggak keberhasilan tata kelola terbesarnya adalah pengakuan dan integrasi Pengetahuan Adat (*Indigenous Knowledge*) secara sejajar dengan sains modern. Pendekatan ini memberikan legitimasi sosial yang tinggi bagi institusi, terutama dalam membentengi masyarakat lokal dari

ancaman "kolonialisme hijau" (*green colonialism*) yang kerap menyertai proyek-proyek transisi energi global.

Akan tetapi, terlepas dari berbagai keberhasilan kognitif dan normatif tersebut, efektivitas Dewan Arktik terbukti sangat rapuh ketika dihadapkan pada realitas politik kekuasaan (*hard politics*). Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 telah secara drastis menghancurkan pilar "eksepsionalisme Arktik", membekukan kerja sama formal antarnegara, dan menciptakan celah yang berisiko melumpuhkan akurasi data iklim global. Dinamika politik yang transaksional dari negara-negara anggotanya membuktikan bahwa otoritas ilmiah yang telah dibangun selama puluhan tahun dapat dengan mudah menjadi tidak berdaya tanpa adanya komitmen dan stabilitas politik yang mengikat.

5.2 Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur Tata Kelola Lingkungan Regional (REG) dan diskursus mengenai Komunitas Epistemik. Studi kasus Dewan Arktik secara langsung menantang paradigma institusional tradisional yang mengasumsikan bahwa efektivitas tata kelola lingkungan lintas batas selalu membutuhkan instrumen paksaan (*enforcement mechanism*) yang kaku. Sebaliknya, realitas di Arktik membuktikan bahwa pengaruh kebijakan yang mengakar dapat diraih melalui kekuatan persuasi ilmiah dan proses pembelajaran sosial, asalkan produksi pengetahuan tersebut memenuhi tiga atribut utama, yaitu kredibilitas, legitimasi, dan saliensi. Di sisi lain, temuan penelitian ini juga menyoroti kelemahan dari konsep isolasi epistemik. Pandangan klasik yang menganggap bahwa para ilmuwan dapat bekerja di balik perlindungan dinding yang terisolasi secara politik

nyatanya kurang relevan dalam kondisi krisis absolut. Bukti empiris dalam krisis Arktik menunjukkan bahwa dalam situasi geopolitik yang ekstrem, isolasi kognitif tersebut runtuh, dan ilmu pengetahuan ekologis pada akhirnya ikut tersandera oleh kebangkrutan saluran diplomatik konvensional.

5.3 Rekomendasi

Beranjak dari temuan dan kesimpulan tersebut, penelitian ini merumuskan sejumlah rekomendasi operasional dan strategis bagi berbagai pihak terkait. Bagi para pembuat kebijakan dan diplomat di Dewan Arktik, sangat mendesak untuk merumuskan inovasi pendanaan (*institutional supply*) yang lebih otonom dan tidak sepenuhnya bergantung pada kontribusi sukarela tahunan dari negara anggota, guna mencegah kelumpuhan institusi di tengah krisis politik antarnegara. Di samping itu, diperlukan segera pembentukan "diplomasi jalur kedua" (*Track II diplomacy*) yang digerakkan oleh lembaga akademis non-pemerintah. Langkah ini krusial untuk memitigasi krisis data iklim dengan cara mempertahankan aliran data pengamatan *permafrost* dan ekosistem dasar melintasi "Celah Rusia", demi menjaga keselamatan sistem peringatan dini iklim global.

Sementara itu, bagi organisasi perwakilan masyarakat adat, direkomendasikan untuk terus mengonsolidasikan daya tawar politik mereka dengan memanfaatkan kekuatan hak prerogatif melalui status *Permanent Participants*. Konsolidasi ini sangat penting untuk mengawal implementasi prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (*Free, Prior, and Informed Consent* - FPIC) secara ketat, agar wilayah-wilayah adat terlindungi dari ancaman eksploitasi mineral kritis yang dibingkai atas nama agenda hijau global. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk

melakukan studi komparatif antara arsitektur kelembagaan Dewan Arktik dengan rezim tata kelola regional non-mengikat lainnya, seperti di kawasan Antartika atau ASEAN. Penelitian lanjutan ini diharapkan dapat menguji lebih jauh mengenai sejauh mana model pengaruh Komunitas Epistemik dapat direplikasi dalam upaya meredam konflik sumber daya alam di berbagai zona geo-strategis lainnya.

